

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA LEBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2013

Moh. Ainol Yakin

094254204 (PPKn, FIS, UNESA) yayan_yakin@yahoo.co.id

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FIS, UNESA) agussa_adi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arah dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam pemilihan kepala desa tahun 2013. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan variabel adalah partisipasi politik. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah keseluruhan pemilih di Desa Lembung sejumlah 982 pemilih dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 pemilih (10%) dan menggunakan metode pengumpulan data berupa angket, wawancara dan observasi. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu pemilihan kepala desa di desa Lembung tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan melalui pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 sangat tinggi yaitu 98,2% masyarakat telah menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Lembung karena adanya agen-agen sosialisasi politik dalam pelaksanaan tersebut sehingga kesadaran dalam memilih calon kepala desa sangat tinggi karena masyarakat ingin mencari sosok pemimpin demi perubahan-perubahan yang ada didesa tersebut.

Kata kunci : partisipasi politik, pemilihan kepala desa

This research aims to describe the direction and the factors that influence people's political participation of Lembung Village Galis District Pamekasan in village elections in 2013. The method used is descriptive quantitative with variables in the political participation. Selected population in this research was the overall electorate in the Lembung Village 982 voter number and sample research 100 voter (10%) and research will use the file collection methods such as questionnaires and interviews. Based on the data of this research Village elections in rural districts Lembung classified level of citizen participation in active participation, because to the government's political awareness is very high in providing support to the government through election of village heads in order to advance the prosperity of society Lembung village. Lembung village level community participation in village elections in 2013 is as high as 98.2% of citizens use their ballots in the election of village heads. The factors influence the village of District Lembung because agents of political socialization in the implementation of awareness in choosing a candidate so the village head is very high because people want to find a leader for the changes that the existing village.

Keywords : political participation, village elections

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau

lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut McClosky (dalam Budiardjo, 2008:368) partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Huntington dan

Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan suatu tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang suatu pimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, memberi kesempatan pada daerah untuk mengurus dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintah pusat sehingga pihak-pihak pemerintah harus mengambil tindakan langsung kepada masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip otonomi desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Namun, sebagai catatan, prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan prinsip wilayah merdeka. Sebagai daerah otonom, desa memang memiliki berbagai kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya, dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada desa dalam penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku

sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia, serta aturan-aturan lain yang berlaku. Hal tersebut berakibat yang mengikat dan membatasi kewenangan desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya di wilayahnya demi tercapainya pembangunan dalam suatu desa. Sebagai wujud timbal baliknya, maka Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya telah mengakomodasi kepentingan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional agar desa menjadi ukuran dalam kemajuan dalam perekonomian di masyarakat setempat. Sehingga muncullah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di level Kabupaten. Berdasarkan kewenangan ini, maka Pemerintah Kabupaten menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah pusat untuk menata desa agar menjadi desa yang maju dan sejahtera.

Pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab mengatur desanya agar menjadi baik serta terciptanya tujuan bersama rakyat sekitar sehingga warga bisa hidup nyaman dan tentram. Tugasnya sebagai kepala desa tidak sama dengan presiden karena kepala desa bisa mengenal langsung dengan warga yang berada di desa tersebut tetapi presiden hanya interaksi dengan rakyat luas sehingga belum mengenal langsung dengan warganya.

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk daerah pedesaan yang sangat besar itu, apabila dapat dibina dengan baik, merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat.

Dalam sistem pemerintah desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. Di desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan rata-rata masyarakat sudah tahu dan mengenal calon yang akan bertarung dalam Pilkades yang dilaksanakan pertengahan bulan April tahun 2013. Mereka memiliki calon masing-masing yang dipercayai untuk bisa memimpin desa tersebut agar

tercipta perubahan program-program yang lama dengan yang baru agar masyarakat bisa makmur dan hidup sejahtera dan memajukan pembangunan desa.

Dalam masyarakat adat/primordial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Masyarakat desa Lembung mayoritas kehidupannya masih tradisional. Masyarakat menganggap bahwa kyai adalah orang yang dapat di percayai oleh masyarakat agar nilai-nilai religi terjaga dan bisa memberi arahan dalam kehidupan masyarakat misalnya dalam memilih kepala desa setempat.

Pemilihan kepala desa tahun ini serentak di 25 desa di kabupaten Pamekasan yaitu kecamatan Galis, Larangan, Pademawu, dan Pakong yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2013. Pada saat ini mekanisme pemilihan kepala desa sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Misalnya dalam hal pendaftaran untuk menjadi calon kepala desa pada saat ini mencapai Rp. 40.000 per hak pilih atau 1 suara. Dana tersebut dibebankan kepada calon kepala desa karena telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30/2012 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2012, tentang mekanisme Pilkades serta besaran biaya minimal tersebut.

Kehidupan masyarakat Lembung rata-rata menjadi petani garam sehingga mereka tidak tahu langsung dalam kehidupan politik dan tidak memiliki wawasan yang luas tentang kehidupan berpolitik. Menurut warga, dunia politik hanya mencari keuntungan atau ingin menguasai suatu kekuasaan sehingga mereka ingin berpartisipasi langsung saja dalam pemilihan walaupun tidak harus mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Salah satu pendorong warga masyarakat desa tersebut karena ingin mencari sosok kepala desa yang baru demi kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Pemilihan kepala desa kali ini ada 3 calon kepala desa yang akan dipilih langsung oleh warga Lembung yaitu Slaman, Syaiful Arif dan H. Hoirul Anwar. Di desa Lembung terdapat 5 dusun yaitu Lembung Utara, Lembung Tengah, Lembung Selatan, Bungkaleng dan Bengkal dan memiliki warga sejumlah 1269 orang dan pemilih daftar tetap 982 orang. Desa Lembung merupakan desa berada diujung timur dari kota Pamekasan, dan merupakan desa yang nilai perekonomiannya terdapat dari hasil tambak, garam dan bercocok tanam. Pada tahun 2013, warga Lembung akan memberikan hak suara

dalam pemilihan kepala desa serta adanya informasi yang dianggap sangat merespon peneliti untuk melakukan penelitian didesa tersebut.

Alasan penulis memilih judul skripsi ini tentang Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 agar penulis bisa mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2013 dan faktor-faktor yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat Desa Lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013

Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Hebert McClosky (dalam Budiardjo, 1994:183) "Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".

Maran (2001:147) mendefinisikan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Rush (1997:57) mendefinisikan partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik. Sedangkan pengertian partisipasi politik menurut Surbakti adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (1999:140)

Nie dan Verba (dalam Budiardjo, 1994:184) "Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka".

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo 1994:184) "Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mengambil keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, dan efektif atau tidak efektif".

Dari pengertian-pengertian para tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara untuk ikut serta mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik dengan maksud agar kebijakan politik yang dibentuk oleh elit politik sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat, sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

Dinyatakan Budiardjo, sumber banyaknya partisipasi masyarakat umumnya dianggap lebih baik. Pada titik ini, tingkat partisipasi menjadi indikator bahwa warga negara memahami, mengikuti, dan bahkan terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah negara. Selain itu, ada kekhawatiran dengan rendahnya tingkat partisipasi ini, pimpinan negara dianggap kurang tanggap atau tidak responsive terhadap aspirasi warganya.

Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Lawan kata dari mobilisasi adalah demobilisasi.

Mobilisasi dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan keadaan bahaya dengan tingkat-tingkat sebagai berikut: Mobilisasi Umum, Mobilisasi Terbatas, Mobilisasi Khusus.

Surbakti (1999:141) mengemukakan ada beberapa ciri-ciri kegiatan partisipasi politik yaitu: Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan kegiatan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (*nonviolence*).

Lane menyatakan bahwa partisipasi politik juga memiliki empat fungsi (Rush dan Althoff, 2000:181),

yaitu: Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu.

Ada lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (Faturrohman,2002:190) yaitu: Kegiatan pemilihan yaitu mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon, dan lain-lain. *Lobbying* yaitu mencakup upaya-upaya seseorang atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Kegiatan organisasi yaitu menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, dengan maksud untuk memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang. Tindakan kekerasan (*Violence*) merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang. Tujuannya untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan) dan mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

Pendapat itu diperkuat oleh Milbrath M.L. Goel (Faturrohman 2002:191) yang mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual antara lain:

- a. *Apathetic inactives*
Tidak beraktivitas yang partisipatif, tidak pernah memilih
- b. *Passive supporters*
Memilih secara regular atau teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, mencintai Negara.
- c. *Contact specialist*
Pejabat penghubung local (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
- d. *Communicators*
Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat dalam editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik.
- e. *Party and campaign workers*
Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau

- kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik
- f. *Community activists*
Bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.
- g. *Protesters*
Bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik dijalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.

Milbrath dan Goel (dalam Surbakti, 1999:143) membedakan partisipasi menjadi empat kategori yaitu:

- Apatis*
Apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- Spectator*
Spectator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- Gladiator*
Gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
- Pengkritik konvensional*
Pengkritik artinya dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.

Olsen dalam Surbakti (1999:143) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Beliau membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan yaitu : Pemimpin politik, Aktivis politik, Komunikator, Warga negara, Marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), Orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Pernyataan tersebut didukung oleh Cohen dan Uphoff (Susilo 2003:72) yang membagi partisipasi menjadi empat jenis yaitu : Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi dalam evaluasi

Tingkatan Partisipasi Politik

Berdasarkan tinggi rendahnya, Paige (dalam Surbakti, 1999:144) membagi partisipasi menjadi empat tipe yaitu :

- Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.
- Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis).
- Militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.
- Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Sedangkan menurut Roth (dalam Budiardjo, 2007:189) mengemukakan terdapat tiga tingkatan partisipasi politik antara lain :

- Aktivis, meliputi :
 - Pembunuh politik, pembajak, teroris (menyimpang)
 - Pejabat umum, pejabat partai sepenuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan.
- Partisipan, meliputi :
 - Petugas kampanye aktif dalam partai/ kelompok kepentingan
 - Petugas kampanye aktif dalam proyek-proyek sosial
- Pengamat, meliputi :
 - Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik dan perhatian pada perkembangan politik
 - Orang yang apolitis

Wan Usman mendefinisikan pemilih sebagai seorang yang dengan suka rela menyumbangkan suaranya. Pemilih disini dibagi menjadi: (1) pemilih sukarela tanpa termobilisasi yaitu pemilih yang tanpa paksaan bersedia memberikan hak pilihnya kepada Negara. (2) pemilih sukarela yang termobilisasi. Pemilih jenis ini meskipun memberikan suaranya pada pemilu, namun pada dasarnya niatnya tidak tulus, ada sebab-sebab yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Sebab-sebab itu bisa berupa dukungan sanjatan atau adanya praktek money politik (Wan Usman 1997:54).

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi, dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni

- Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpartisipasi. Inilah bentuk konkret partisipasi aktif.
- Non Partisipan politik. Inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian ini semakin besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidakpedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat (dalam, Ruslan 2000:105).

Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik. Bentuk konkret sikap ini dapat di lihat pada tiga fenomena yaitu

Ketidakpedulian politik. Yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepatuhan kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidakmampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman. Keraguan politik. Yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktivitas politiknya adalah pekerjaan buruk. Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi (Ruslan 2000:105).

Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui : Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut. Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini biasanya menyebabkan individu berkembang wawasan politiknya dan ikut andil dalam persaingan politik, sehingga mendorongnya untuk bergabung kepada partai atau kelompok politik tertentu, atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu misalnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan

minat memecahkan problematikanya. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi (Ruslan, 2000:102-103).

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi (Ruslan 2000:101-102) bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'rif dan mencegah kemunkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik. Faktor jenis individu: laki-laki atau perempuan, juga berpengaruh besar terhadap partisipasi politik di sebagian masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan. Semua itu sering disebut sebagai faktor-faktor sosial. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya

Weber mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut : Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Efektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau entusiasme terhadap suatu ide, organisasi, atau individu. Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok social (Rush 2000:181)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten. Menurut UU No.32 Tahun 2004, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiktif, berwenang untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau di bentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". Di daerah perkotaan, bentuk pemerintahan terendah disebut "kelurahan" yang dipimpin oleh lurah. Desa yang ada di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda. Desa yang menjadi kelurahan tidak seketika berubah dengan adanya pembentukan kota, begitu pula desa yang berada di perkotaan dalam pemerintahan kabupaten (Rozali, 2005:165)

Menurut Widjaja (2001:65) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut Sudirwo adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003; 10) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* yang berlaku diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Menurut Widjaja (2003;14) adapun tujuan pemerintah desa yaitu: Penyeragaman pemerintah desa. Memperkuat pemerintah desa. Mampu

mengerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi. Penyelenggaraan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif masih jauh dari apa yang diharapkan khususnya SDM. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Menurut Widjaja (2001;113) persyaratan yang berhak dipilih, memilih, tata cara pelantikan, tugas dan kewajiban, larangan dan penyidikan dan pemberhentian kepala desa.

a. Syarat menjadi kepala desa

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: Bertakwa kepada Tuhan YME. Setia dan taat kepada Pancasila Dan UUD 1945. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan menghianati Pancasila dan UUD 1945. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/atau berpengetahuan yang sederajat. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan. Berkelakuan baik, jujur dan adil. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat

b. Yang berhak memilih

berhak memilih kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus. Sudah berumur 17 (tujuh belas)

tahun dan atau telah pernah kawin. Tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pemerintah, Negara, Pancasila dan UUD 1945

- c. Tugas dan kewajiban kepala desa yaitu Membina penyelenggaraan pemerintah desa. Membina kehidupan masyarakat desa. Membina perekonomian desa. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan menunjukkan kuasa hukumnya. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD/BPM menetapkan sebagai peraturan desa. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup berkembang di desa yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepala desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD/BPM dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui camat. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan kepala desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban kepala desa yang telah ditolak BPD/BPM termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus di lengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari dan disampaikan kembali kepada BPD/BPM.

Menurut Widjaja (2001:65) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut Sudirwo adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003; 10) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* yang berlaku diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang

dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dirasa cocok karena berusaha untuk mendiskripsikan Partisipasi Politik Masyarakat Lembung dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dan diharapkan akan dapat mengambil suatu gambaran dalam penelitian tersebut

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk mengumpulkan data. Lokasi yang digunakan adalah di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung jumlah pemilih adalah 982 orang. Maka diambil 10% dari populasi yang ada, yakni 100 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka, yaitu salah satu jenis angket dimana item pertanyaan pada angket juga disertai beberapa kemungkinan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dinilainya paling disukai. Angket digunakan untuk mencari hubungan dengan peran dari kegiatan Pemilihan Kepala desa.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara verbal, untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Dalam wawancara peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengancam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pemilih dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa Di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. (Sugiyono, 2009: 137)

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Sutirno Hadi (1986) Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi akan dilaksanakan pada saat pemilihan kepala desa berlangsung yaitu hari Minggu, 14 April 2013

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan prosentase melalui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif. Menggunakan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :
 P = Skor Prosentase
 n = Skor Jawaban Responden
 N = Skor Maksimal

Data yang diperoleh melalui angket perlu dikuantifikan terlebih dahulu, dengan menentukan skor terhadap angket dan setiap nomor terdiri atas lima pilihan jawaban dengan skor berbeda pada tiap pilihan adalah sebagai berikut :

- sangat setuju = skor 5
- setuju = skor 4
- kurang setuju = skor 3
- tidak setuju = skor 2
- sangat tidak setuju = skor 1

Selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dikualifikasikan maka perlu ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

- 1% - 20% = Sangat Rendah
- 21% - 40% = Rendah
- 41% - 60% = Sedang
- 61% - 80% = Tinggi
- 81% - 100% = Sangat Tinggi

Kemudian hasil dari perhitungan berupa persentase dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan demikian akan diperoleh kebenaran data yang dapat menggambarkan peranan Pemilihan Kepala Desa sebagai partisipasi politik dalam di lingkungan masyarakat desa Lembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Hasil Penelitian

Tabel 1`

Persentase Jawaban untuk Indikator Partisipasi Politik pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lembung

No soal/angket	Jawaban %					Jumlah skor/ present ase
	SS	S	KS	TS	STS	
1. pemilihan kepala desa	45	52	3	0	0	442
	45%	52%	3%	0%	0%	88,4 %
2. pilkades sebagai kegiatan umum bagi masyarakat	32	57	11	0	0	421
	32%	57%	11%	0%	0%	84,2%
3. Bebas mengeluarkan hak pilih	38	56	4	2	0	430
	38%	56%	4%	2%	0%	86%
4. Mentaati peraturan pada saat pilkades	33	60	7	0	0	426
	33%	60%	7%	0%	0%	85,5%

Dari hasil penelitian kuisisioner 1, 52 responden atau 52% menjawab setuju dengan pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan kegiatan berpolitik dalam memilih pemimpin desa demi tercapainya kehidupan yg sejahtera dalam masyarakat. Responden yang kurang setuju dengan dengan perihal tersebut sebanyak 3 responden atau 3%. Kuisisioner 2, 57 responden atau 57% menjawab setuju dengan kegiatan pilkades menjadi kegiatan yang umum bagi seluruh masyarakat lembung tanpa batasan status dan kedudukan. Responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 11 responden atau 11%. Kuisisioner 3, 56 responden atau 56% menjawab setuju dengan seluruh masyarakat lembung bebas mengeluarkan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkades. Responden yang tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 2 responden atau 2%. Kuisisioner 4, 60 responden atau 60% menjawab setuju dengan seluruh masyarakat Lembung harus mentaati peraturan dalam menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Responden

yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 7 responden atau 7%

Tabel 4.2
Penyaluran partisipasi politik

No soal/angket	Jawaban %					Jumlah skor/ present ase
	SS	S	KS	TS	STS	
5. Kegiatan politik dalam pilkades	43	51	6	0	0	437
	43%	51%	6%	0%	0%	87,5%
6. Pilkades merupakan kehidupan dalam berpolitik	33	62	5	0	0	428
	33%	62%	5%	0%	0%	85,6%
7. Para calon melakukan tanya jawab dengan pemilih	29	48	23	0	0	406
	29%	48%	23%	0%	0%	81,2%

Kuisisioner 5, 51 responden atau 51% responden yang menjawab setuju dengan kegiatan politik seperti pilkades membutuhkan partisipasi mereka, dan responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 6 responden atau 6%. Kuisisioner 6, 62 responden atau 62% menjawab setuju dengan Pilkades merupakan suatu kewajiban masyarakat dalam kehidupan politik untuk memilih kepala desa. Responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 5 responden atau 5%. Kuisisioner 7, 48 responden atau 48% menjawab setuju dengan para calon harus melakukan tanya jawab dengan masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pilkades dan responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 23 responden atau 23%.

Tabel.3
Tindak lanjut penyaluran partisipasi politik

No soal/angket	Jawaban %					Jumlah skor/ presentase
	SS	S	KS	TS	STS	
8. Mengajukan	33	49	18	0	0	415

an usulan apabila terjadi aturan yang kurang tepat	33%	49%	18%	0%	0%	83%
9. pilkades sering dirasa hanya menguntungkan kelompok	27	53	18	2	0	405
	27%	53%	18%	2%	0%	81%
10. pemilih menunjukkan sikap yang baik	21	67	7	5	0	404
	21%	67%	7%	5%	0%	80,8%
11. tanggapan yang bersifat baik dari masyarakat	25	63	8	4	0	409
	25%	63%	8%	4%	0%	81,8%
12. suara masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pilkades	30	60	10	0	0	420
	30%	60%	10%	0%	0%	84%
13. pilkades menjadi ajang taruhan (judi)	19	14	10	18	39	256
	19%	14%	10%	18%	39%	51,2%
16. wujud nyata dari penyaluran partisipasi politik	25	67	8	0	0	417
	25%	67%	8%	0%	0%	83,4%

Kuisisioner 8, 49 responden atau 49% menjawab setuju dengan para pemilih dalam pilkades dapat mengajukan usulan manakala menemui suatu aturan yang mereka rasa kurang tepat, responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 18 responden atau 18%. Kuisisioner 9, 53 responden atau 53% menjawab setuju dengan kegiatan pilkades sering dirasa hanya menguntungkan kelompok ataupun pihak tertentu dan responden yang kurang setuju sebanyak 2 responden atau 2%. Kuisisioner 10, 67 responden atau 67% responden menjawab setuju dengan pemilih menunjukkan sikap yang baik pada waktu pelaksanaan pilkades dan responden yang tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 5 responden atau 5%. Kuisisioner 11, 63 responden atau 63% menjawab setuju dengan tanggapan yang

Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013

disampaikan oleh pemilih selalu bersifat positif (baik) dalam pelaksanaan kegiatan pilkades dan responden yang tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 4 responden atau 4%. Kuisisioner 12, 60 responden atau 60% menjawab setuju dengan suara masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pilkades dan responden yang kurang setuju sebanyak 10 responden atau 10%. Kuisisioner 13, 39 atau 39% menjawab sangat tidak setuju dengan pilkades menjadi ajang taruhan (judi) dan responden kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 10 responden atau 10%. Kuisisioner 16, 67 responden atau 67% menjawab setuju dengan kritik maupun saran yang diberikan oleh pemilih merupakan wujud nyata dari penyaluran partisipasi politik mereka dan responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 8 responden atau 8%.

Tabel 4

Persentase Jawaban untuk Indikator Faktor-Faktor Terjadinya Partisipasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

No soal	Jawaban %					Jumlah skor/persentase
	SS	S	KS	TS	STS	
14.kepala desa harus mendorong pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang sesuai apa yang dibutuhkan	49	49	2	0	0	447
	49%	49%	2%	0%	0%	88,6%
15.rakyat salah satu unsur dalam bidang politik	19	73	7	1	0	410
	19%	73%	7%	1%	0%	82%
17. <i>money politik</i>	28	30	9	16	17	336
	28%	30%	9%	16%	17%	67,2%
18. hasil yang diperoleh harus diterima dengan baik	38	55	4	3	0	428
	38%	55%	7%	3%	0%	85,6%

19.Kepala desa memberikan perlindungan kepada masyarakat	26	68	5	1	0	419
	26%	68%	5%	1%	0%	83,8%
20. pilkades telah berhasil menanamkan pola pikir masyarakat	36	58	4	1	1	427
	36%	58%	4%	1%	1%	85,4%

Kuisisioner 14, 49 responden atau 49% menjawab sangat setuju dengan kepala desa harus mendorong pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Lembung dan responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 2 responden atau 2%. Kuisisioner 15, 73 responden atau 73% menjawab sangat setuju dengan rakyat merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan dalam bidang politik dalam memilih pemimpin dan responden tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 1 responden atau 1%.

Kuisisioner 17, 28 responden atau 28% menjawab sangat setuju dengan calon kepala desa banyak yang menggunakan *money politik* untuk merebut suara rakyat dan responden yang kurang setuju dengan perihal tersebut sebanyak 9 responden atau 9%. Kuisisioner 18, 55 responden atau 55% menjawab setuju dengan hasil yang diperoleh harus diterima dengan baik oleh masyarakat agar tidak terjadi konflik dan responden yang tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 3 responden atau 3%. Kuisisioner 19, 68 responden atau 68% menjawab setuju dengan Kepala desa memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terciptanya kerukunan antar warga dan responden sangat tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 1 responden atau 1%. Kuisisioner 20, 58 responden 58% menjawab setuju dengan PILKADES telah berhasil menanamkan pola pikir kepada masyarakat untuk lebih kritis terhadap kegiatan politik terutama dalam pemilihan umum dan responden yang sangat tidak setuju dengan perihal tersebut sebanyak 1 responden dengan frekuensi 1 atau 1%.

Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat Desa Lembung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Tahun 2013

Pemilihan kepala desa atau lebih dikenal dengan sebutan pilkades yang telah diselenggarakan dengan diikuti oleh 3 kandidat calon kepala desa. Pilkades di desa Lembung ini telah diadakan pada tanggal 9 April 2013, dan hasil dari pilkades tersebut diumumkan pada tanggal 16 April 2013. Adapun daftar nama calon kepala desa beserta jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon kepala desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5

No Urut	Nama calon kepala desa	Total suara	Present ase
1	Slaman	275	28%
2	Saiful Arif, SH	211	21,4%
3	H.Hairul Anwar	448	45,6%

Menurut tabel di atas hasil pemilihan kepala desa Lembung adalah Slaman mendapatkan perolehan suara 275 suara (28%), Saiful Arif, SH mendapatkan 211 suara (21,4%), dan H. Hairul Anwar dengan perolehan 448 suara (45,6%). Pemilihan kepala desa Lembung tahun 2013 dimenangkan oleh H. Hairul Anwar. Pada pemilihan ini suara tidak sah hanya 31 suara (3,1%) dan jumlah suara yang tidak terpakai 17 surat suara (1,7%).

Para kandidat mengadakan berbagai kegiatan untuk menarik simpati dari rakyat sekitar, misalnya bersosialisasi dengan masyarakat Lembung dan mendengarkan keluhan apa yang dialami oleh masyarakat tersebut mengenai hal-hal apa saja yang kurang baik dan dikeluhkan oleh rakyatnya. Dalam kampanye pilkades, rakyat wajib memberikan argumentasi atau pertanyaan mengenai program-program apa yang akan dijalankan oleh calon kepala desa demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini calon kepala desa harus menarik simpati masyarakat desa Lembung untuk

datang ke TPS dengan memberikan hak pilih mereka dalam pelaksanaan kegiatan pilkades tahun 2013 dengan kegiatan seperti pengajian. Kegiatan partisipasi politik suara masyarakat Lembung sangat dibutuhkan dalam kegiatan pilkades karena untuk menentukan kepala desa yang akan terpilih. Pada tahun ini pemilihan kepala desa dilaksanakan serentak se kabupaten Pamekasan.

Budiardjo(1994:183) mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan kepala desa berlangsung, panitia membentuk susunan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh warga pada saat pemilihan kepala desa. Sehingga pada pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung warga bisa mendengarkan aturan-aturan yang harus dipatuhi yang telah disampaikan oleh panitia pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik mensyaratkan adanya sosialisasi politik yang harus dialami oleh setiap individu. Karena tanpa adanya sosialisasi politik tidak akan mengakibatkan terjadi partisipasi politik. Pengalaman yang diperoleh melalui sosialisasi politik akan menciptakan perilaku dan orientasi individu dalam aktivitas politik, di samping menentukan sejauhmana partisipasi politiknya.

Pada pelaksanaan kepala desa berlangsung, masyarakat Lembung sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Sebelum pembukaan, warga banyak yang mengantri untuk mencoblos calon kepala desa yang akan dipilih. Sehingga petugas banyak yang mengalami kesulitan untuk menertibkan warga karena banyaknya warga yang mengantri pada saat pemilihan kepala desa berlangsung. Pemilihan kepala desa ini memang beda dengan pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Sebagai pesta demokrasi yang di gelar 6 tahun sekali banyak warga yang berdatangan ke TPS bahkan banyak yang rela membawa keluarganya yang sedang sakit atau mengalami buta warna untuk mencoblos pemilihan kepala desa. Menurut warga sekitar, satu suara penting dalam pemilihan kepala desa karena akan berdampak pada perolehan suara yang akan dihasilkan, tetapi ada salah satu warga tidak membawa keluarganya yang mengalami sakit untuk mencoblos karena alasan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada 9 April 2013 saat ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat desa Lembung. Untuk memilih calon kepala desa sekarang banyak warga yang memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa walaupun dengan situasi dan kondisi yang kurang stabil. Tetapi masyarakat Lembung bisa menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kesadaran politik desa Lembung ini dipengaruhi oleh keterlibatan dalam kehidupan dalam kegiatan organisasi yang ada di desa tersebut. Selain itu juga dipengaruhi adanya saling interaksi atau mencari informasi kepada agen-agen sosialisasi politik untuk memperoleh manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dengan tujuan agar kenyamanan hidup bersama serta untuk mensejahterakan masyarakat sekitar melalui pemilihan kepala desa.

Pada saat penghitungan suara berlangsung, warga mulai mendatangi TPS di desa Lembung tersebut. Bukan hanya dari orang desa setempat, bahkan banyak warga yang bukan berasal dari desa tetangga serta ada yang dari luar kota untuk mengetahui hasil dan sekaligus pemenang dalam pemilihan kepala desa. Kejadian ini memang sangat menjadi persoalan di masyarakat sekitar bahkan di desa lain, karena ketiga calon kepala desa ini sangat dikenal oleh masyarakat Lembung dan sekitarnya, serta adanya berita-berita yang sangat merespon masyarakat luar untuk melihat kejadian-kejadian pada saat penghitungan suara. Hal ini mendorong masyarakat luar turut serta meramaikan pesta demokrasi ini walaupun mereka tidak ikut langsung dalam pemilihan kepala desa.

Tipologi partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pemilihan kepala desa adalah Gladiator. Gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Dalam pemilihan kepala desa tahun 2013, masyarakat desa Lembung secara aktif memberikan hak suara mereka untuk memilih pemimpin. Dengan melibatkan warga dalam proses politik sebagai tim sukses dari masing-masing calon kepala desa sekaligus menjadi agen sosialisasi politik dalam memberikan penyuluhan tentang pemilihan kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa di desa Lembung, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan tingkat partisipasi warga tersebut tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memajukan desa Lembung demi kemakmuran masyarakat. Pada

saat pemilihan berlangsung dari 982 pemilih, 965 pemilih menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa tersebut dengan surat suara yang sah 934 suara dan suara yang tidak sah 31 suara, dan 17 surat suara tidak terpakai.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Partisipasi Masyarakat Desa Lembung Dalam Pemilihan Kepala Desa Pada Tahun 2013

Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda sebagai anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat. Tujuan sosialisasi politik adalah untuk mengembangkan individu sebagai person politik atau pribadi politik. Yakni sejumlah orientasi yang terbentuk dalam diri individu dalam menghadapi dunia politik, termasuk di dalamnya pandangan tentang peran politiknya secara khusus.

Sebelum pelaksanaan pilkades, para agen-agen sosialisasi politik sangat antusias dalam melaksanakan program-program sosialisasi politik. Agen-agen sosialisasi politik antara lain keluarga karena keluarga merupakan agen utama dalam proses sosialisasi politik. Sebanyak 100 responden mengakui pernah diajak oleh agen-agen sosialisasi politik untuk berdiskusi tentang pentingnya partisipasi politik dalam pilkades tahun 2013. Selanjutnya, agen sosialisasi politik adalah *peer group*. *Peer group* adalah teman-teman yang berada disekelilingnya. Pada saat penyebaran angket bahwa warga diajak oleh teman atau warga di desa tersebut untuk berdiskusi tentang pilkades. Selanjutnya, agen sosialisasi politik adalah media massa. Media massa dimaksudkan adalah surat kabar, televisi, radio dan spanduk serta aksesoris. Pada saat itu banyak calon kepala desa yang menggunakan spanduk yang ada di sepanjang jalan menuju desa Lembung dengan konsep yang lebih menarik simpati masyarakat.

Adapun faktor yang melatarbelakangi partisipasi politik masyarakat desa Lembung dalam pelaksanaan kepala desa, yaitu tokoh masyarakat/kyai. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, kyai sangat penting dalam memberikan penyuluhan dalam kehidupan politik karena kultur masyarakat desa Lembung masih tradisional yaitu kepercayaan. Dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat memberikan dukungan melalui pengajian dan memberikan doa tanpa adanya

paksaan maupun dorongan kepada warga untuk memberikan dukungan. Dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat mengajak warga Lembung untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan yang akan dipilih tanpa ada paksaan dari orang lain.

Menurut masyarakat desa Lembung, tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena merupakan sosok yang dapat memberi bantuan atau masukan dalam menjalankan kehidupan beragama di desa. Dalam kegiatan pilkades tokoh masyarakat/kyai tersebut memberikan doa untuk masing-masing kandidat calon kepala desa agar bisa menjadi pemimpin desa yang peduli kepada masyarakat demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Pada saat kampanye, calon kepala desa nomer urut 1, yaitu Slaman, sangat antusias melakukan kampanye-kampanye politik didesa Lembung. Berbagai program yang diberikan untuk menarik simpati masyarakat. Adapun salah satu orang yang diberikan oleh calon kepala desa ini adalah program pengajian yang diselenggarakan di rumah calon kepala desa ini untuk meminta dukungan serta doa restu agar terpilih menjadi kepala desa. Jika menjadi kepala desa program-program yang belum terlaksana akan dijalankan dengan kepentingan bersama dan memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu.

Calon kepala desa nomer urut 2 adalah Saiful Arif.S.H. Calon kepala desa ini pada saat kampanye cukup antusias dalam melakukan kampanye politiknya. Berbagai program yang diberikan untuk menarik simpati masyarakat. Adapun program-program yang diberikan oleh calon kepala desa ini adalah program pengajian yang diselenggarakan di rumah calon kepala desa ini untuk meminta dukungan serta doa restu agar terpilih menjadi kepala desa. Setelah acara pengajian, tim sukses memberikan aksesoris seperti baju yang berstiker *tongue out* menandakan kepercayaan calon ini untuk sebagai calon pemenang kepala desa.

Calon kepala desa nomer urut 3 adalah H. Hoirul Anwar. Calon kepala desa ini pada saat kampanye sangat antusias dalam melakukan kampanye politiknya. Berbagai program yang diberikan untuk menarik simpati masyarakat. Adapun program-program yang diberikan oleh calon kepala desa ini adalah program pengajian yang diselenggarakan dirumah calon kepala desa ini untuk meminta dukungan serta doa restu agar terpilih menjadi kepala desa. Setelah acara pengajian, tim sukses memberikan aksesoris seperti baju. Jika calon kepala desa ini menang program-program yang selama ini tidak jalan akan diperbaiki dan direncanakan secara matang.

Setelah pemilihan kepala desa terpilih, kepala desa yang terpilih sebagai kepala desa dilantik secara bersamaan dengan kepala desa yang terpilih lainnya. Pelantikan kepala desa ini dilakukan secara bersamaan dan dilantik oleh bupati Pamekasan. Namun kenyataannya pelantikan ini banyak warga yang turut hadir untuk menghadiri pelaksanaan pelantikan kepala desa demi mengetahui langsung proses pelantikan serta memberi dukungan kepada kepala desa terpilih agar menjadi kepala desa yang peduli sama rakyat dan tidak mementingkan diri sendiri.

Setelah pelantikan, kepala desa Lembung melakukan tindakan-tindakan dengan aparat desa dan bersosialisasi hal-hal apa yang kurang baik dari sarana dan prasarana. Dalam kesempatan tersebut kepala desa membuat program-program yang baru dan cukup terbukti dengan adanya perbaikan akses jalan yang menuju ke kampung-kampung yang berada di desa Lembung sehingga aktivitas warga berjalan dengan lancar dan bantuan-bantuan dalam perekonomian dibidang pertanian sudah terealisasi dengan baik.

Adapun hasil wawancara mengenai apa saja yang diharapkan oleh masyarakat Lembung kepada kepala desa yang terpilih sebagai berikut:

"...Keinginannya sih banyak, kalau saya sendiri pengennya itu kepada kepala desa yang terpilih yang sudah ada diposisinya, atau yang terpilih, saya minta itu supaya lebih adil lagi kepada masyarakatnya, dan terutama segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan juga program-program yang baik dan meningkatkan remaja-remaja disini dalam kehidupan yang baik (Uswatun Hasanah)..."

"...Supaya menenangkan masyarakat dan mensejahterakan rakyat serta bantuan-bantuan harus diturunkan langsung kepada rakyat (Nahrudin)..."

"...Agar kepala desa sekarang baik kepada masyarakat agar kalo ada kesulitan dibantuin, lalu dikasik tanah parcaton untuk bisa bekerja menanam tembakau serta memberi tambak buat produksi garam(Julaeha)..."

SIMPULAN

1. Tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala desa di desa Lembung kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah melalui pemilihan kepala desa untuk memajukan desa Lembung demi kemakmuran masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 sangat tinggi yaitu 98,2%

warga telah memberikan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan karena adanya agen-agen sosialisasi politik dalam pelaksanaan tersebut sehingga kesadaran dalam memilih calon kepala desa sangat tinggi karena masyarakat ingin mencari sosok pemimpin demi perubahan-perubahan yang ada didesa tersebut.

SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada penelitian berikutnya peneliti menyarankan agar agen-agen sosialisasi politik seharusnya memberikan penyuluhan tentang pemilihan kepala desa agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik serta sarana dan prasarana yang cukup sehingga kenyamanan warga bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Daerah Secara langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Faturohman, Deden. 2002. *Ilmu Politik*. Malang : UMM Press.
- Kencana Syafii, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Munadjid, Danu Saputra, ST. 1978. *Wawasan Nusantara (Dalam Ilmu Politik Dan Hukum)*. Bandung
- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rush, Mighael& Philip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz, 2000, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia
- Sudirwo, Daeng, Drs. 1980, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Angkasa Anggota IKAPI
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Susilo, Suko, dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya
- Syarbaini, Syahrial. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI
- Usman, Wan. 1997. *Pemerataan Pembangunan Dan Ketahanan Nasional*, Kerjasama UT-UL Lumhannas
- Widjaja, HAW. 1993. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintah Desa dan Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sumber Internet

[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan kepala desa&oldid=6434558](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_kepala_desa&oldid=6434558) di akses pada 4 maret 2013